Brainy
Volume 7, No. 1, Bulan Juni 2026, Halaman. 11-20
ISSN 2962-4622

# PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA SKPD KABUPATEN GARUT

Putri Qintar Auliyazahra[1], Elvira Zeyn[2]

[1,2]*Universitas Pasundan, Indonesia*

*received: 24/2/2026; revised: 8/3/2026; accepted: 30/6/2026*

***ABSTRACT***

*This study aims to examine the influence of regional financial management and the regional financial accounting system on the performance of local governments at the Regional Apparatus Work Units (SKPD) of Garut Regency. The research was conducted in 2024 using primary data collected during the 2024 research period. This study employed a quantitative approach with descriptive and verification methods. The research population consisted of 31 Regional Apparatus Work Units (SKPD) in Garut Regency. The sampling technique used was Non-Probability Sampling with a saturated sampling (census) method, resulting in all 31 SKPD being included in the study, with a total of 93 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression analysis, multiple correlation analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing through partial tests (t-test) and simultaneous tests (F-test). The findings indicate that regional financial management has a positive and significant effect on local government performance. Likewise, the regional financial accounting system has a positive and significant effect on local government performance. Furthermore, regional financial management and the regional financial accounting system simultaneously have a significant influence on local government performance. These findings imply that improving the quality of regional financial management supported by an effective regional financial accounting system can enhance local government performance and contribute to the realization of accountable, transparent, and effective public sector governance.*

***Keywords*****:** *Regional Financial Management, Regional Finance Accounting System, Regional Government Performance, Regional Apparatus Work Units (SKPD), Garut Regency.*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada tahun 2024. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan verifikatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian terdiri atas 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* dengan metode sampling jenuh (*sensus*), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan total 93 responden. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kabupaten Garut.

* putriqintar02@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Perubahan dalam pemerintahan Indonesia seiring dengan terjadinya reformasi mengakibatkan perubahan dari sistem pemerintahan yang awalnya terpusat menjadi sistem

desentralisasi yang bertujuan pada pembentukan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6), yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah perlu dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Penerapan otonomi daerah menuntut tata kelola keuangan yang terdesentralisasi, di mana efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas publik menjadi fokus utamanya (Apip & Maesaroh, 2016). Kerangka ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019, yang mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai siklus menyeluruh—mencakup tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan harus diterapkan secara konsisten sejak tahap awal penyusunan hingga eksekusi APBD.

Merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan bentuk nyata manajemen keuangan daerah yang disahkan tiap tahun melalui Peraturan Daerah. Agar seluruh hak serta kewajiban daerah dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat, tata kelola keuangan harus dijalankan secara maksimal. Implementasi prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik wajib melekat di setiap tahapan—mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga realisasi anggaran—guna mewujudkan pengelolaan dana yang ekonomis, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan yang menyajikan informasi semua aktivitas organisasi secara benar. Penyajian informasi yang akurat dan tepat sangat bernilai bagi pihak mana pun dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2015:1).

Kinerja mencerminkan tingkat pencapaian suatu organisasi dalam mengeksekusi program kerja demi mewujudkan visi, misi, sasaran, serta tujuan yang telah direncanakan (Annisa, 2017). Dalam konteks organisasi sektor publik yang tidak berorientasi pada profit, kondisi surplus atau defisit pada laporan keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pencapaian kinerjalah yang menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan organisasi tersebut (Nordiawan et al., 2011).

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mengkaji,, serta memanfaatkan data guna menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan pencapaian target kerja pemerintah daerah. Melalui evaluasi ini, organisasi dapat memetakan fokus utamanya sekaligus mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut (Mardiasmo, 2007:44).

Fenomena terkait kinerja pemerintah di Indonesia, menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan dan RB Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKPJPP) terdapat 37 dari 77 indikator kinerja pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 tidak mencapai target. Terdapat 5 indikator sesuai target, dan 18 indikator melampaui target, sedangkan 17 indikator lainnya belum teridentifikasi dalam laporan (Kompas, 2023).

Fenomena lain terkait kinerja pemerintah daerah terlihat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa beberapa indikator sasaran belum berhasil memenuhi target. Terhambatnya pencapaian kinerja tersebut salah satunya dipicu oleh terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam menyokong realisasi seluruh target yang telah direncanakan (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 2022, 2022).

Selanjutnya fenomena terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu satu indikator sasaran kinerja yang belum mencapai target, yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

(IPKD). Kabupaten Garut berada pada nomor 5 dengan indeks total sebesar 75,701, dengan kategori perlu perbaikan dan nilai B. Adapun kelemahan pada Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yaitu, pertama, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan nilai 8,21 dari bobot 15 dan kondisi keuangan daerah dengan nilai 3,12 dari bobot 15. (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, 2022).

Faktor kedua yang turut memengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Efektivitas dan kelancaran sistem ini menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mendongkrak kinerjanya. Veronica et al. (2019) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan identifikasi, pengukuran, pencatatan, hingga pelaporan transaksi ekonomi pemerintah (baik kabupaten, kota, maupun provinsi) untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Keterkaitan antara pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah telah dikaji dalam sejumlah studi terdahulu. Penelitian oleh Rahmad Hidayat (2015) membuktikan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Temuan sejalan dipaparkan oleh Vivid Annisa (2017), yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan *good governance*. Selain itu, Sitti Murniati (2020) juga menegaskan bahwa variabel pengawasan, sistem akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif serta signifikan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

Walaupun studi-studi sebelumnya mengonfirmasi adanya pengaruh pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah, beberapa keterbatasan masih perlu didalami. Mayoritas penelitian terdahulu mengambil setting lokasi, subjek, serta rentang waktu yang berbeda, sehingga temuan yang ada belum tentu relevan dengan dinamika di Pemerintah Kabupaten Garut. Di samping itu, pembahasan sebelumnya cenderung berfokus pada pengaruh parsial antarvariabel tanpa menyandingkannya dengan data riil—seperti capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) maupun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menyajikan bukti empiris yang lebih kontekstual mengenai kontribusi kedua variabel tersebut terhadap kinerja SKPD di Kabupaten Garut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut; (2) apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut; dan (3) apakah pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh masing-masing variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penulisan artikel ini terbagi ke dalam empat tahapan utama. Bagian awal diawali dengan pendahuluan yang mengulas latar belakang, fenomena yang diangkat, tinjauan pustaka, serta rumusan masalah dan tujuan studi. Pembahasan dilanjutkan dengan penjabaran metodologi yang digunakan, disusul oleh penyajian hasil temuan beserta analisisnya. Sebagai penutup, naskah ini menyajikan kesimpulan, batasan kajian, dan rekomendasi untuk riset berikutnya.

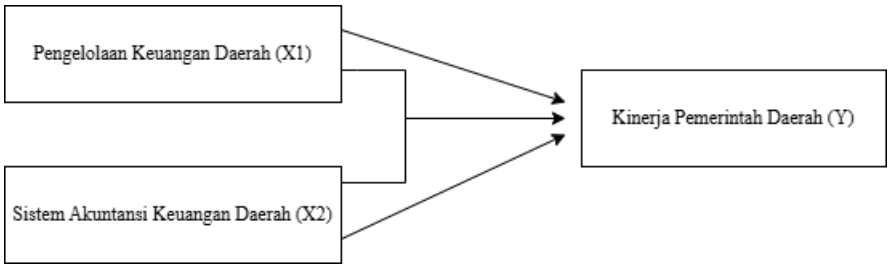



**Figure 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut. H2: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut. H3: Pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

## METODE

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif dan verifikatif berbasis kajian empiris untuk memetakan keterkaitan serta pengaruh antar variabel. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019:64), penelitian deskriptif ditujukan untuk mengamati keberadaan variabel mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif dipakai untuk memotret gambaran pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, serta kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Garut. Sementara itu, penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2019:65) merupakan metode yang digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Pendekatan verifikatif dalam kajian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

Kajian ini berjenis penelitian replikasi yang mengadopsi model konseptual serta instrumen dari studi-studi terdahulu yang mengulas topik pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, hingga kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengembangkan model konseptual baru, melainkan menguji kembali hubungan antar variabel pada konteks yang berbeda, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut. Meskipun demikian, terdapat penyesuaian pada redaksi beberapa butir kuesioner agar sesuai dengan karakteristik organisasi perangkat daerah, regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan daerah, serta kondisi empiris Pemerintah Kabupaten Garut. Penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi indikator yang digunakan sehingga validitas konstruk penelitian tetap mengacu pada penelitian terdahulu.

Data yang terkumpul selanjutnya diproses, dianalisis, dan dikembangkan berlandaskan kerangka teori yang relevan hingga menghasilkan kesimpulan. Sementara itu, analisis data menerapkan pendekatan kuantitatif melalui teknik statistik guna menguji hipotesis yang diajukan. Alur pelaksanaan kajian ini diawali dari operasionalisasi variabel, perancangan skala pengukuran, penyusunan rancangan hipotesis, hingga penetapan metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2019:15), pendekatan kuantitatif merupakan metode berbasis filsafat positivisme yang diterapkan untuk mengamati populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen riset dalam pengumpulan data, serta berfokus pada analisis statistik demi menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019:126), populasi ditakrifkan sebagai area generalisasi yang mencakup subjek maupun objek dengan atribut serta volume tertentu yang dipilih peneliti untuk dikaji hingga menghasilkan kesimpulan. Adapun Sugiyono (2019:127) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari proporsi dan ciri khas yang melekat pada populasi tersebut. Penentuan ukuran sampel menjadi tahapan krusial untuk menetapkan porsi elemen yang akan diteliti, baik melalui perhitungan statistik maupun pertimbangan estimasi ilmiah. Proses penarikan sampel ini harus dirancang secara cermat agar unit yang terpilih benar-benar bersifat representatif—dalam arti mampu mencerminkan kondisi populasi secara utuh dan akurat.

Subjek populasi dalam riset ini berfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut yang dibatasi pada tingkat Badan dan Dinas. Pengambilan sampel menerapkan teknik *Non-Probability Sampling* melalui pendekatan sampel jenuh (*census sampling*). Dengan demikian, jumlah sampel yang diteliti sepadan dengan total populasinya, yaitu sebanyak 31 SKPD. Dari setiap SKPD ditetapkan 3 orang responden, sehingga secara keseluruhan diperoleh 93 unit responden yang terlibat dalam kajian ini. Rincian daftar 31 SKPD Kabupaten Garut tersebut disajikan sebagai berikut:

**Table 1. Populasi Penelitian**

| No | SKPD KABUPATEN GARUT |
|---|---|
| 1. | Dinas Pendidikan |
| 2. | Dinas Kesehatan |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 5. | Dinas Pemadam Kebakaran |
| 6. | Dinas Sosial |
| 7. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8. | Dinas Ketahanan Pangan |
| 9. | Dinas Lingkungan Hidup |
| 10. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11. | Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 12. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 13. | Dinas Perhubungan |
| 14. | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 15. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 16. | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu |
| 17. | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 18. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 19. | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 20. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 21. | Dinas Pertanian |
| 22. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 23. | Inspektorat Daerah |
| 24. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 25. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 26. | Badan Pendapatan Daerah |
| 27. | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 28. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 29. | Sekretariat Daerah |
| 30. | Sekretariat DPRD |
| 31. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga jenis variabel, yang meliputi: variabel bebas (pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah), dan variabel terikat (kinerja pemerintah daerah). Dalam pengujian hipotesis ini, penulis menetapkannya dengan uji signifikansi, yaitu dengan menetapkan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). Untuk mengetahui bentuk hubungan fungsional antara pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah, penulis menggunakan analisis regresi linier berganda. Seluruh hipotesis dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, setiap data dan pertanyaan kuesioner telah dinyatakan valid melalui uji validitas yang dilakukan. Variabel penelitian berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas data dengan signifikansi > 0,05. Variabel penelitian selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi kuesioner penelitian yang digunakan telah memenuhi kriteria uji reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil regresi linier berganda seperti disajikan pada Tabel 2.

**Table 2. Analisis Regresi Linier Berganda Coefficientsa**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .431 | .081 | | 5.320 | .000 | | | | | |
| | Pengelolaan Keuangan Daerah | .266 | .075 | .510 | 3.546 | .000 | .557 | .557 | .557 | .787 | 1.271 |
| | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | .698 | .209 | .659 | 3.339 | .000 | .629 | .629 | .629 | .787 | 1.271 |

Merujuk pada nilai koefisien (kolom B) dalam tabel *Coefficients*, bentuk persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

**Y = 0.431 + 0.266X1 + 0.698X2**

Berdasarkan model regresi linear berganda yang diperoleh, makna dari setiap variabel dapat dijabarkan sebagai Konstanta (a) sebesar 0.431 menunjukkan bahwa jika nilai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sama dengan nol maka Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0.431 dengan kata lain jika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat rendah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cenderung melakukan Kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, saat instansi tidak menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka Kinerja Pemerintah Daerah tetap ada pada instansi tersebut karena nilai konsta bertanda positif.

Koefisien regresi (b) bernilai positif sebesar 0.266 menunjukkan bahwa setiap bertambahnya Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 1% diprediksi akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0.266. Artinya, pada saat Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan ikut meningkat.

Koefisien regresi (b) bernilai positif sebesar 0.698 menunjukkan bahwa setiap bertambahnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1% diprediksi akan

meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0.698. Artinya, pada saat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan ikut meningkat.

**Table 3. Analisis Korelasi Simultan Model Summaryb**

| | | | | | Change Statistics | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | Durbin-Watson |
| 1 | .835a | .698 | .659 | 6.65985 | .649 | 34.698 | 2 | 90 | .000 | 1.067 |

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil perhitungan pada tabel memperlihatkan koefisien korelasi bernilai 0,835, yang tergolong dalam kategori hubungan sangat kuat. Tanda positif pada nilai tersebut mengindikasikan hubungan yang searah: peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

**Table 4. Uji F ANOVAa**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 2581.411 | 2 | 1290.705 | 29.698 | .000b |
| | Residual | 3271.055 | 90 | 37.598 | | |
| | Total | 5852.466 | 92 | | | |

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

Ho = 0 : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ha ≠ 0 : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

*Taraf signifikan (a): 0.05 (5%)*

Kriteria :

1. Tolak Ho jika F hitung > F table atau Tolak Ho jika -F hitung > -F table
2. Terima Ho jika F hitung < F table atau Ho jika -T hitung < -F table

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 29.698. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel pada derajat bebas (N-F-1=93-2-1=90) sebesar 2.709. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Fhitung (29,698) > Ftabel (2,709), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

**Table 5. Koefisien Determinasi Model Summaryb**

| | | | | | Change Statistics |
|---|---|---|---|---|---|

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .835a | .698 | .659 | 6.65985 | .649 | 34.698 | 2 | 90 | .000 | 1.067 |

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Data pada tabel di atas menunjukkan nilai R2 (*R-Square*) sebesar 0,698. Nilai tersebut mengindikasikan besarnya Koefisien Determinasi (KD), yang diperoleh dari kuadrat nilai koefisien korelasi (R), untuk mengukur sejauh mana variabel independen memberikan kontribusi atau pengaruh dalam model.

**Koefisien Determinasi = (0. 835)2 x 100% = 69.8%**

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 69.8%. Sedangkan sisa nya sebesar 30,2% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis diantaranya yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Penyusunan Anggaran, *Good Governance*, Pengawasan Internal.

Mengenai hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) mempunyai nilai positif 0.557 menunjukkan bahwa setiap bertambahnya Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 1% diprediksi akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0.557.

Hasil analisis data mengindikasikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berhubungan signifikan dan berbanding lurus dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmad Hidayat (2015), yang mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan yang optimal mampu mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang berkualitas serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengelolaan keuangan berbasis kinerja mencerminkan akuntabilitas, di mana alokasi anggaran disesuaikan dengan sasaran strategis instansi. Hal ini memperkuat asumsi bahwa tata kelola keuangan yang baik berdampak langsung pada kinerja organisasi, sebagaimana juga ditegaskan oleh temuan Cottalismewati et al. (2022).

Terkait hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ($X_2$) dan Kinerja Pemerintah Daerah, nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,629. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1% diproyeksikan akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,629.

Hasil pengolahan data mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, semakin memadai penerapan sistem akuntansi tersebut, semakin meningkat pula kinerja pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vivid Annisa (2017), yang mengemukakan bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi berperan penting dalam mengarahkan kegiatan serta mengukur kinerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi menyediakan informasi realisasi anggaran yang sesuai dengan target, sehingga mampu mendukung efektivitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem akuntansi keuangan mempengaruhi efisiensi pengelolaan anggaran serta pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Penerapan yang efektif dan efisien juga krusial dalam mencegah potensi penyimpangan maupun penyelewengan. Temuan ini turut memperkuat

hasil studi Veronica et al. (2019) yang mengonfirmasi pengaruh signifikan variabel tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.

Secara simultan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan kontribusi sebesar 69,8% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin optimal tata kelola keuangan serta implementasi sistem akuntansi, semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah yang dicapai. Temuan ini sejalan dengan studi Vivid Annisa (2017) yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik berorientasi pada efisiensi dan efektivitas mekanisme pemerintahan melalui dukungan sistem akuntansi yang memadai. Selain itu, hasil penelitian ini turut mengonfirmasi temuan Rahmad Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut. Pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut.

Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik serta didukung dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan, partisipasi penyusunan anggaran, *good governance* dan pengawasan internal.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, *4*(1), 2017.

Apip, M., & Maesaroh, F. (2016). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, *4*(1), 28–39. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jawara/article/view/3395

Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.

Hidayat, R. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, *3*(1).

*Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 2022*. (2022). https://www.garutkab.go.id/page/lkip Mardiasmo. (2007). *Otonomi Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Murniati, S. (2020). PENGARUH PENGAWASAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *AkMen Jurnal Ilmiah*, *17*(4), 548–557. https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen

NABABAN, W. M. C. (2023). *Hampir Separuh Indikator Kinerja Pemerintah Pusat Tak Capai Target*. Kompas. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/04/hampir-separuh-indikator-kinerja-pemerintah-pusat-tak-capai-target

Nordiawan, Deddi, & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Veronica, S., Layuk, P., & Rante, A. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *14*(1), 87–99. https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154